

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Relawan Kebencanaan dalam Mitigasi dan Siap Siaga Bencana di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff yang meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Partisipasi relawan dalam pengambilan keputusan telah berlangsung pada tingkat konsultatif dan teknis melalui pemberian informasi mengenai kondisi lapangan, potensi ancaman bencana, jalur evakuasi, kesiapan personel, kebutuhan masyarakat, serta berbagai aspek teknis lainnya yang mendukung penyusunan program mitigasi dan kesiapsiagaan. Namun demikian, keterlibatan relawan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas karena sebagian besar keputusan mengenai penetapan program, prioritas kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan pengalokasian anggaran masih menjadi kewenangan BPBD. Belum terbentuknya forum relawan kebencanaan di tingkat kabupaten juga menyebabkan partisipasi relawan dalam proses perencanaan belum berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan.

Partisipasi relawan dalam pelaksanaan merupakan bentuk partisipasi yang paling dominan dalam penyelenggaraan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bojonegoro. Relawan berkontribusi secara aktif melalui pemberian

tenaga, waktu, pengetahuan, keterampilan, jaringan sosial, serta pengalaman dalam berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pelatihan SAR, pendampingan Desa Tangguh Bencana (Destana), pemetaan kelompok rentan, komunikasi kebencanaan, distribusi logistik, hingga kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu anggota relawan karena pekerjaan utama, belum meratanya kompetensi teknis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi dalam kondisi tertentu sehingga diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, dan dukungan operasional yang berkelanjutan.

Partisipasi relawan dalam pemanfaatan hasil menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan telah memberikan manfaat bagi relawan, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Relawan memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jaringan kerja, serta kemampuan dalam menghadapi situasi kebencanaan. Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pengurangan risiko bencana, prosedur evakuasi, penentuan titik kumpul, dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga, sedangkan BPBD memperoleh dukungan kapasitas melalui terbentuknya jejaring relawan dan penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana). Akan tetapi, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena tidak seluruh masyarakat mengikuti kegiatan secara berkelanjutan dan peningkatan kapasitas relawan belum

sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sarana, peralatan, maupun dukungan operasional yang memadai.

Partisipasi relawan dalam evaluasi telah dilaksanakan melalui kegiatan debriefing, rapat koordinasi, penyusunan laporan kegiatan, serta komunikasi antara BPBD, relawan, dan masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan. Evaluasi tersebut menghasilkan berbagai masukan terkait sarana dan prasarana, metode pelaksanaan, pembagian tugas, jalur evakuasi, kelompok rentan, serta penyempurnaan skenario latihan. Namun demikian, proses evaluasi belum terinstitusionalisasi secara optimal karena belum tersedia mekanisme baku dalam pencatatan hasil evaluasi, tindak lanjut rekomendasi, maupun penyampaian umpan balik kepada relawan. Akibatnya, tidak seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat diketahui perkembangan maupun implementasinya sehingga fungsi evaluasi sebagai dasar perbaikan program belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan keempat dimensi partisipasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi relawan kebencanaan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik, terutama pada aspek pelaksanaan yang menunjukkan keterlibatan aktif relawan dalam berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana. Akan tetapi, aspek pengambilan keputusan dan evaluasi masih memerlukan penguatan agar relawan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga memiliki ruang yang lebih luas

dalam proses perencanaan, penyusunan kebijakan, serta evaluasi program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan forum relawan kebencanaan, peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan, pengembangan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis, serta peningkatan kapasitas relawan secara berkelanjutan agar penyelenggaraan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bojonegoro dapat berlangsung secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

B. SARAN

1. Bagi BPBD Kabupaten Bojonegoro

BPBD perlu membentuk atau mengaktifkan forum pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten yang melibatkan organisasi relawan, pemerintah desa, kelompok perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, akademisi, dunia usaha, dan unsur layanan dasar. Forum perlu mempunyai agenda rutin, tata kerja, dan hasil rapat yang terdokumentasi.

Relawan perlu dilibatkan sejak tahap identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas, penentuan sasaran, dan desain kegiatan, bukan hanya setelah jadwal serta anggaran ditetapkan. Setiap usulan perlu dicatat dan diberikan status diterima, ditunda, atau tidak dapat dilaksanakan beserta alasannya.

BPBD perlu menyusun database relawan yang memuat organisasi, wilayah, kompetensi, sertifikasi, pengalaman, ketersediaan, perlengkapan, dan kontak. Database tersebut perlu digunakan untuk pembagian peran, pemetaan

kebutuhan pelatihan, dan mobilisasi yang aman. Setiap kegiatan perlu menggunakan briefing tertulis yang sederhana, pembagian tugas, jalur komunikasi, petugas keselamatan, dan identitas personel. Pelatihan dasar perlu dibuat berjenjang dan diulang secara berkala, terutama bagi anggota baru.

Evaluasi perlu menggunakan format singkat yang memuat temuan, rekomendasi, prioritas, penanggung jawab, batas waktu, dan status penyelesaian. Ringkasan tindak lanjut perlu disampaikan kepada koordinator, relawan, pemerintah desa, dan peserta yang relevan.

2. Bagi Organisasi dan Koordinator Relawan

Koordinator perlu mengumpulkan masukan anggota sebelum rapat dengan BPBD agar keterwakilan tidak hanya bergantung pada pandangan pengurus. Hasil rapat perlu disampaikan kembali kepada anggota secara tertulis dan mudah dipahami. Organisasi relawan perlu menetapkan standar keselamatan, kode etik, mekanisme verifikasi informasi, dan batas kewenangan. Relawan tidak boleh menjalankan tugas di luar kompetensi atau tanpa alat pelindung yang memadai. Latihan internal dan gabungan perlu dijadwalkan secara berkala, termasuk latihan komunikasi, pertolongan pertama, evakuasi kelompok rentan, pengelolaan pengungsian, dan dokumentasi kegiatan.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat

Pemerintah desa perlu menjadikan mitigasi sebagai agenda rutin, memperbarui peta ancaman, data kelompok rentan, jalur evakuasi, titik kumpul,

dan daftar kontak. Informasi perlu disebarkan melalui beberapa saluran agar menjangkau warga yang tidak menggunakan telepon pintar. Masyarakat perlu melakukan latihan keluarga, menyimpan dokumen dan nomor penting, membagi peran untuk membantu anak, lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang membutuhkan obat rutin, serta mengikuti simulasi secara berkala.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya perlu melengkapi wawancara dengan observasi kegiatan, notulen rapat, daftar hadir, dokumen Destana, peta risiko, laporan kegiatan, dan matriks tindak lanjut. Pengukuran sebelum dan sesudah pelatihan dapat digunakan untuk menilai perubahan pengetahuan atau keterampilan tanpa menghilangkan analisis kualitatif. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji representasi kelompok rentan, pengaruh relawan terhadap anggaran dan prioritas program, perbedaan partisipasi antar desa, serta keberlanjutan kapasitas setelah program selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Y., Respati, D., & Hidayatulloh, R. (2025). PERAN STRATEGIS PEMUDA DALAM MITIGASI BENCANA DI INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Jurnal Samudra Geografi*, 8, 166–176. <https://doi.org/10.33059/jsg.v8i2.11383>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana*.
- Balen, D., & Balen, D. (n.d.). *DI SD PILANGGEDE KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO Fatiya Rosyida 1 dan Khofifatu Rohmah Adi 2 Abstrak Astract*. 1–5.
- Bencana, B. N. P. (2024). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. BNPB. <https://dibi.bnpb.go.id>
- Bencana, B. N. P. (2025). *Data Informasi Bencana Indonesia Tahun 2025*. BNPB. <https://bnpb.go.id>
- Bojonegoro, D. I. K. (2020). *Implementasi kebijakan mitigasi bencana di kabupaten bojonegoro*. 4(2), 7–11.
- Cohen, John M. and Uphoff, N. T. (1977a). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Center for International Studies, Cornell University.

Cohen, John M. and Uphoff, N. T. (1977b). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Rural Development Committee, Center for International Studies, Cornell University.

Creswell, John W. and Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

data-jumlah-korban-jiwa---Bojonegoro. (n.d.).

Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, F., Meirinawati, D., & Ap, M. (n.d.).

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DI DESA PILANGSARI KABUPATEN BOJONEGORO Devi Indah Pratiwi Abstrak.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2020). *World Disasters Report 2020: Come Heat or High Water*. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.
<https://www.ifrc.org/document/world-disasters-report-2020>

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.

Nadifah, S., Susilo, C., & Hamid, A. (2024). *Hubungan Mitigasi Early Warning System (EWS) dengan kesiapsiagaan Relawan dalam Menghadapi Bencana di Desa Supiturang Kabupaten Lumajang*. 1–8.

- Nugroho, R., & Wicaksono, K. W. (2020). Reformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 101–115.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research \& Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ppkn, P. S., & Unesa, F. (2007). *PARTISIPASI MASYARAKAT TANGGAP BENCANA BANJIR DI KABUPATEN GRESIK* Yenny Nur Amalia Maya Mustika Kartika Sari. 14040254015.
- Reduction, U. N. O. for D. R. (2023). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction*. UNDRR. <https://www.undrr.org>
- Stowara. (2023). Youth Volunteerism's Contribution to Natural Disaster Mitigation in Indonesia: Insights from Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC). *Jurnal Partisipatoris*.
- Sukmawati, D., Suciati, T. N., Syafrina, A. E., & Barat, J. (2025). *Peningkatan Literasi Digital Kebencanaan Pada Siswa Sekolah Alam Tunas Mulia , Bantargebang Improving Digital Literacy in Disaster Preparedness Among Students at Sekolah Alam Tunas Jawa Barat menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan terhadap bencana alam . Kondisi geografisnya yang berada di jalur cincin api dan memiliki topografi pegunungan menjadikan provinsi ini rawan terhadap gempa bumi dan tanah Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB , 2024) menunjukkan bahwa*

sepanjang tahun 2024 , Jawa Barat mengalami 32 kejadian gempa bumi dan 49 kejadian tanah longsor . Angka ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur maupun Jawa Tengah . Kajian risiko BNPB (Pusat Data , 2023) memperkirakan potensi dampak gempa bumi dapat memengaruhi 47 , 5 juta jiwa , 6 , 1 juta penduduk . Data ini menegaskan bahwa kerentanan Jawa Barat tidak hanya terkait frekuensi bencana , tetapi juga skala risiko yang bakal dihadapi masyarakat . Perspektif kerentanan sosial (Wisner et al . , 2004) menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan memperbesar potensi korban , terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak , lansia , Selain ancaman gempa dan tanah longsor , banjir juga menjadi bencana yang kerap melanda wilayah urban Jawa Barat , terutama di Kota dan Kabupaten Bekasi . Pada awal Maret 2025 , banjir besar melumpuhkan aktivitas ribuan warga , dengan ketinggian air mencapai 150 – 300 cm di sejumlah titik . Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian material , tetapi juga memperburuk kesehatan masyarakat akibat air tercemar . Tabel 1 bencana yang kerap melanda wilayah Selain bencana hidrometeorologis , Bekasi memiliki kerentanan tambahan berupa bencana ekologis dari keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang . Gunung sampah yang menjulang hingga puluhan meter tidak hanya menimbulkan persoalan pencemaran udara dan air tanah , tetapi juga berulang kali menjadi sumber bencana kebakaran dan

longsor . Pada Oktober 2023 , kebakaran besar melanda Zona 2 Bantargebang akibat tumpukan sampah kering dan cuaca panas ekstrem (Rahma Vania Indriani Putri , 2023). Pada pertengahan 2025 , longsor sampah kembali terjadi dan bahkan memaksa pemerintah Kota Bekasi menetapkan status darurat lingkungan , dengan ratusan rumah warga berada dalam kondisi terancam (Telusurnews ; Metrotvnews , 2025). TPA Bantargebang nyata dan berulang , kajian akademik yang secara khusus menyoroti kerentanan masyarakat di sekitar TPA masih sangat min.... 10(3), 486–493.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2007).

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2023). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2023: Mapping Resilience for the Sustainable Development Goals*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. <https://www.undrr.org/gar/gar2023-special-report>

Yuliani, R., & Prasetyo, D. (2022). Pemanfaatan sistem informasi desa dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(2), 134–146.